

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Assihiddiqie Jimly, (2012) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, Tahun Hal 402.
- Bungin, Burhan. (2001) *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ashshofa Burhan.(2013).*Metode Penelitian Hukum*.Penerbit PT. Asdi Mahasatya. Jakarta
- Creswell, John W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publication.
- Denzin, K. Norman dan Yvonnas S. (2009) *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi Khairul. (2016) *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*.Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta hal 146.
- Labolo Muhadam.(2014) *Catatan Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia, Peluang,Tantangan, dan Recoferi*.Penerbit wadi Press. Hal 8-9.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,.
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Raffiuddin Riady. *Teori Politik*. (2012) Penerbit Universitas Terbuka. Banten.hal 44.
- Ragawino, Bega. (2005). *Pengantar Ilmu hukum. Pahala Khatulistiwa*. Bandung. Hlm 4-6
- Sugiyono, (2011)*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, (2004) *Good Governance (Kepemirntahan Yang Baik)*. Bandung. Mandar Maju.

- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Angraini Titi dkk. (2017). Evaluasi pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional. (Jurnal) Yayasan Perludem. hal iii
- Rasida Asda dkk. (2016) Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang di tulis pada tahun 2016. Hal 8
- Fahmi Chairul (2017). Sangkarut Politik Hukum Di Aceh analisis terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ansari Insa Muhammad (2017). Partai Politik Lokal Dalam Tata Hukum Indonesia. Jurna Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Zulfahmi (2017). Peran Lembaga Eksekutif dan Legislatif Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, (Jurnal) Pasca Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
- M. Hantoro Novianto. (2009) Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 hal 11-12
- Muhammad Aslansyah & Firman Umar, jurnal yang berjudul Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang *Pure Theory Of Law* Ditinjau Dari Perspektif Keadilan. Universitas makassar
- Kaho, J. R. (2012). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta, Polgov JPP Fisipol UGM.
- Leo Agustino Sayed Fahrul. Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018. *Journal of Governance*, Volume 3, Issue 1, June 2018 (50-66). Hal 51.
- Refly Harun - Pilkada Langsung Di Aceh, (2005). Di Antara Sengketa Tiga Aturan. *Lex Journalica/ Vol 3 /No. 1 /April. 2005. Hal 6-7*
- KIP kabupaten Aceh Tamiang. (2017) Laporan Tahapan Pilkada Aceh Tamiang Tahun 2017
- KIP Provinsi Aceh (2017). Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017.

Undang-Undang Dan Peraturan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam

MOU Helsinki antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disepakati bersama di Filandia. Hal 2-3.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2007 tentang Pembentukan Partai Politik Lokal

Qanun Provinsi NAD Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at islam

Qanun Provinsi NAD Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Qanun nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

PKPU Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Naskah Dinas

PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Daan Wakil Bupatidan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua Dan Papua Barat Hal 23.

PKPU Nomor 5 tahun 2016 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota. hal 18.

PKPU Nomor 17 tahun 2015 tentang tata naskah dinas KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KIP kabupaten Kota

PKPU Nomor 4 tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jendral KPU, Provinsi dan kabupaten Kota

PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan dan jadwal pemeliharaan kepala daerah

PKPU Nomor 10 tahun 2017 tentang Ketentuan khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota Di wilayah Aceh. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Keputusan KIP Aceh Tamiang NOMOR : 1/Kpts/KIP-Kab-001.434600/TAHUN 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 66/Puu-Xv/2017 dalam Amar Putusan

Artikel Online :

www.penataanruang.net, prosedur penyusunan sinkronisasi (diakses 1 September 2018)

[https:// www.acehtamiangkab. go.id/ selayang-pandang/demografi-daerah.html](https://www.acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/demografi-daerah.html) (diakses 20 Juni 2019)

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/11160/Menyoal-Syarat-Ketat-Calon-Perseorangan-OLEH-TITI-ANGGRAINI> (diakses 26 Mei 2019)

<https://sketsanews.com/hanya-ada-di-aceh-tes-ujian-baca-al-quran-bagi-calon-kepala-daerah.> (diakses 11 Mei 2019)

